



Upaya Mengatasi Kesenjangan Sosial Di Sekolah Dasar Dalam Perspektif Teori Konflik Karl Marx

Nadya Aulia Sari

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Zalfa Zahirah

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jl. Tanah Merdeka No.20, RT.11/RW.02,
Kampung Rambutan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13830

Korespondensi penulis: nadyaasari970@gmail.com, zahirhzalfa@gmail.com

Abstract. This article examines social inequality in elementary schools through the perspective of Karl Marx's conflict theory. The purpose of this study is to identify the causes of social inequality in elementary education and to formulate relevant solutions based on Marx's thinking. The method used is a qualitative descriptive approach. The results of the study show that educational inequality is caused by several factors, such as limited facilities and infrastructure, low quality of educators, and high education costs. The results of the study suggest strategic steps to reduce this inequality, namely equal access to education through financial assistance and fair distribution of resources, increasing teacher competence, especially in disadvantaged areas, and developing an inclusive and relevant curriculum for all levels of society. In addition, it is important to create a harmonious school environment that is free from socio-economic discrimination, so that every student feels valued and has the same opportunity to develop.

Keywords: social inequality, elementary school, conflict theory, Karl Marx

Abstrak. Artikel ini mengkaji kesenjangan sosial di sekolah dasar melalui perspektif teori konflik Karl Marx. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab kesenjangan sosial dalam pendidikan dasar dan merumuskan solusi yang relevan berdasarkan pemikiran Marx. Metode yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan disebabkan dari beberapa faktor, seperti terbatasnya sarana dan prasarana, rendahnya kualitas tenaga pendidik, serta tingginya biaya pendidikan. Hasil penelitian mengemukakan langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan tersebut, ialah pemerataan akses pendidikan melalui bantuan finansial dan distribusi sumber daya yang adil, peningkatan kompetensi guru terutama di daerah tertinggal, serta pengembangan kurikulum yang inklusif dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis dan bebas dari diskriminasi sosial-ekonomi, sehingga setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Kata kunci: kesenjangan sosial, sekolah dasar, teori konflik, Karl Marx

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan menentukan arah pembangunan suatu bangsa. Sekolah dasar, sebagai jenjang pendidikan paling awal dalam sistem formal, memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kesempatan yang merata bagi seluruh peserta didik. Namun pada kenyataannya, ketimpangan sosial di lingkungan sekolah dasar masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Ketimpangan ini tampak dalam bentuk perbedaan akses pendidikan, kualitas sarana dan prasarana, serta hasil belajar yang seringkali dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan ekonomi siswa.

Kesenjangan sosial terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama pada para peserta didik sekolah dasar. Permasalahan ini dapat disamakan dengan adanya perbedaan yang mencolok antara siswa kelas atas dan kelas bawah. Kesenjangan sosial juga dapat dikatakan sebagai kondisi yang tidak seimbang dalam tatanan sosial masyarakat yang menciptakan perbedaan nyata. Situasi ini juga menggambarkan bahwa individu dari kalangan kaya memiliki pengaruh dan kedudukan yang lebih kuat dibandingkan mereka yang berasal dari kelompok miskin. Sistem pendidikan modern saat ini dihadapkan pada berbagai permasalahan, salah satunya adalah kesenjangan sosial dalam hal akses, mutu, dan capaian pendidikan. Kesenjangan ini meliputi berbagai aspek, seperti perbedaan dalam kesempatan memperoleh pendidikan, disparitas kualitas pendidikan antar wilayah, serta hasil belajar yang berbeda-beda tergantung pada latar belakang sosial dan ekonomi peserta didik. Untuk menganalisis dan mencari solusi atas persoalan kesenjangan sosial dalam pengelolaan pendidikan, penting untuk meninjau teori-teori sosial yang mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai akar permasalahan tersebut. Salah satu teori yang relevan dalam konteks ini adalah teori Karl Marx, yang menyoroti kesenjangan sosial dan konflik antar kelas sebagai konsekuensi dari struktur sosial dan ekonomi yang timpang (Wahyudin, 2020).

Karl Marx merupakan seorang tokoh penting dalam bidang filsafat, ekonomi, dan sosiologi pada abad ke-19. Ia dikenal luas melalui analisis kritisnya terhadap sistem kapitalisme, struktur kelas sosial, serta dinamika konflik antar kelas. Meskipun Marx tidak secara eksplisit menulis tentang pendidikan, gagasan-gagasananya sangat relevan untuk memahami kesenjangan sosial yang terjadi dalam sistem pendidikan. Menurut Marx, masyarakat kapitalis ditandai oleh pertentangan antara dua kelas utama, yakni kelas borjuis sebagai pemilik modal dan kelas proletar sebagai pekerja. Ketegangan antara kedua kelas ini berakar pada kesenjangan dalam penguasaan sumber daya ekonomi, yang menimbulkan konflik struktural yang terus berlangsung.

Secara etimologis, kata "konflik" berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata kerja *con* yang berarti "bersama" dan *fligere* yang berarti "berbenturan" atau "bertabrakan". Gabungan keduanya membentuk kata *configere*, yang dapat diartikan sebagai "saling memukul". Dalam bahasa Indonesia, istilah konflik mencakup makna seperti perbedaan pendapat, pertentangan, hingga perselisihan. Secara umum, konflik dapat dipahami sebagai bentuk ketegangan atau pertentangan yang muncul dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak terlepas dari interaksi, yang kadangkala menimbulkan konflik, sehingga lahirlah istilah "konflik sosial". Istilah ini merujuk pada ketegangan atau pertentangan antara individu maupun kelompok dalam masyarakat, baik dalam cakupan luas maupun terbatas pada bidang tertentu dalam struktur sosial. Konflik sosial dapat dipahami sebagai proses interaksi antara dua pihak atau lebih, di mana salah

satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain, baik dengan cara langsung menghancurkan eksistensinya maupun membuatnya kehilangan kekuatan dan pengaruh. Dalam kerangka yang lebih luas, konflik juga bisa dilihat sebagai alat atau strategi untuk mencapai tujuan tertentu, meskipun hal tersebut mungkin mengabaikan norma dan nilai sosial yang berlaku.

Melalui pendekatan ini, artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kesenjangan sosial di sekolah dasar dapat dipahami dalam kerangka teori konflik Karl Marx, serta menggali berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan sosial. Dengan memahami dinamika sosial yang terjadi di lingkungan pendidikan dasar, diharapkan tercipta solusi yang lebih adil dan berpihak pada kelompok yang termarjinalkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali kesenjangan sosial dalam pendidikan dasar melalui perspektif teori konflik Karl Marx. Data dikumpulkan menggunakan tiga teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan guru, kepala sekolah, siswa, dan orang tua untuk mendapatkan informasi terkait kesenjangan sosial yang terjadi di sekolah dasar. Observasi dilakukan untuk mengamati interaksi sosial dan kondisi pendidikan, sementara dokumentasi digunakan untuk menganalisis kebijakan dan data terkait pendidikan.

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif, yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas dan kredibilitas data, diterapkan triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber dan metode pengumpulan data. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penyebab kesenjangan sosial serta langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi permasalahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori Konflik Karl Marx Dalam Pendidikan

A. Teori Konflik Menurut Karl Marx

Karl Marx mengembangkan teori konflik sosialnya dengan berlandaskan pada konsep kelas sosial. Teori ini muncul dari sejumlah asumsi dasar yang menjadi fondasi pemikirannya, yang menekankan bahwa masyarakat terbagi menjadi kelas-kelas dengan kepentingan yang saling bertentangan, khususnya

antara kelas pemilik alat produksi (borjuis) dan kelas pekerja (proletar). Konflik antara kelas kelas ini dianggap sebagai kekuatan utama yang mendorong perubahan sosial dan sejarah masyarakat. Pertama, Karl Marx berpendapat bahwa manusia tidak memiliki sifat tetap dan universal, melainkan dibentuk oleh kondisi sosial di mana mereka hidup. Kedua, tindakan, keyakinan, dan cara berpikir individu sangat dipengaruhi oleh hubungan sosial yang mereka jalani dalam masyarakat, yang pada akhirnya ditentukan oleh posisi mereka dalam struktur ekonomi dan kelas sosial. Ketiga, manusia memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari posisi sosialnya dan mengembangkan kesadaran baru mengenai realitas sosial yang mereka alami. Keempat, interaksi sosial selalu didasarkan pada hubungan produksi, yang mengatur cara sumber daya diproduksi dan didistribusikan. Kelima, karena hubungan produksi terus berubah, struktur sosial masyarakat juga mengalami transformasi dari masyarakat primitif, perbudakan, feodalisme, kapitalisme, hingga akhirnya menuju komunisme.

B. Sekolah Dasar Berperan dan Reproduksi Kelas Sosial dalam Perspektif Karl Marx

Dalam pandangan Karl Marx, masyarakat kapitalis tersusun atas dua kelas utama, yaitu borjuis (kelas pemilik modal) dan proletar (kelas pekerja). Hubungan antara keduanya bersifat konflik karena adanya ketimpangan dalam penguasaan sumber daya dan kekuasaan. Marx meyakini bahwa semua institusi sosial, termasuk pendidikan, tidak sepenuhnya netral, melainkan menjadi alat ideologis kelas dominan untuk mempertahankan posisi mereka. Dalam konteks ini, sekolah dasar sebagai institusi sosial formal turut berkontribusi dalam proses reproduksi kelas sosial, yaitu memperkuat struktur sosial yang telah ada melalui mekanisme pendidikan. Sekolah dasar seharusnya menjadi pondasi utama untuk memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh anak tanpa memandang latar belakang sosialnya. Namun, dalam kenyataan sosial, sekolah justru sering kali menjadi cerminan ketimpangan sosial yang terjadi di luar lingkungan pendidikan. Anak-anak dari keluarga kelas atas biasanya masuk ke sekolah dengan fasilitas yang memadai, lingkungan belajar yang mendukung, akses terhadap teknologi, serta dukungan akademik dari keluarga. Sebaliknya, anak-anak dari kelas sosial bawah kerap dihadapkan pada keterbatasan seperti

kurangnya gizi, minimnya fasilitas belajar di rumah, dan kurangnya pendampingan belajar.

Kesenjangan dalam bidang pendidikan, seperti perbedaan pencapaian akademik dan peluang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, menjadi bukti nyata bagaimana sekolah dasar dapat mereproduksi struktur kelas sosial. Ketika akses terhadap pendidikan berkualitas hanya dimiliki oleh kelompok tertentu, maka kesempatan untuk mobilitas sosial menjadi sangat terbatas. Anak-anak dari kelas bawah tetap berada dalam posisi yang sama seperti orang tuanya, sedangkan anak-anak dari kelas atas memiliki keunggulan struktural untuk mempertahankan dominasinya. Ini yang dimaksud Marx sebagai bentuk reproduksi kelas dalam sistem kapitalis, di mana pendidikan berfungsi mempertahankan ketimpangan sosial antar generasi.

2. Kesenjangan Sosial di Sekolah Dasar: Dampak dan Faktor Penyebab

A. Kesenjangan Sosial

Kesenjangan sosial menggambarkan kondisi ketidakseimbangan antara individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks pendidikan, kesenjangan sosial adalah perbedaan yang mencolok dalam akses, kualitas, dan hasil pendidikan yang dialami oleh peserta didik dari latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis yang berbeda. Kesenjangan ini bisa terlihat dari ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas tenaga pendidik, kurikulum yang diterapkan, hingga tingkat partisipasi dan pencapaian belajar. Anak-anak dari keluarga kurang mampu atau yang tinggal di daerah terpencil seringkali mengalami hambatan dalam memperoleh pendidikan yang setara dengan mereka yang tinggal di wilayah perkotaan atau berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lebih baik. Situasi ini muncul sebagai akibat dari masalah sosial, yaitu ketidakharmonisan antara norma-norma dan nilai-nilai sosial dengan kenyataan serta perilaku sosial yang berlangsung. Masalah sosial yang paling mendasar terletak pada ketidaksesuaian antara nilai-nilai ideal dan realitas yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yang berarti harapan yang diinginkan tidak selaras dengan kondisi nyata dalam interaksi sosial. Ketimpangan ini terjadi bukan hanya di lingkungan masyarakat, tetapi juga lazim ditemukan dalam lingkungan pendidikan. Akhirnya berdampak pada

peserta didik, apabila mereka mengalami tekanan sosial atau ekonomi di lingkungan keluarganya, biasanya akan mempengaruhi proses belajar mereka di sekolah.

Letak geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau menyebabkan wilayah-wilayah tersebut terpisah oleh lautan dan hutan. Sebagai negara kepulauan, seharusnya pemerintah mampu menyelenggarakan pemerataan pembangunan ekonomi dan pendidikan bagi seluruh rakyatnya. Namun, kenyataannya pemerataan tersebut, terutama dalam sektor pendidikan, belum sepenuhnya tercapai. Masih banyak ketimpangan dalam hal fasilitas pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Jika dibandingkan dengan daerah yang akses transportasinya lebih mudah, wilayah terpencil cenderung tertinggal dalam pembangunan pendidikan. Hal ini memperkuat kesenjangan sosial di masyarakat, dengan kualitas pendidikan yang timpang menjadi permasalahan serius yang perlu segera ditangani.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Kesenjangan Sosial di Sekolah Dasar

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dalam bidang pendidikan terutama di sekolah dasar diantaranya:

1. Kualitas Sarana Sekolah Yang Masih Rendah

Fasilitas pendidikan merupakan elemen penting dalam mendukung keberlangsungan proses belajar mengajar, seperti gedung sekolah, alat peraga pembelajaran, perpustakaan, dan laboratorium. Kenyataannya kondisi sarana ini masih sangat memprihatinkan terutama di daerah-daerah terpencil. Dibandingkan dengan sekolah-sekolah di kawasan perkotaan yang umumnya telah memiliki infrastruktur yang lengkap dan memadai, sekolah-sekolah di pelosok cenderung tertinggal baik dari segi fisik bangunan maupun ketersediaan fasilitas penunjang lainnya.

2. Rendahnya Kualitas Tenaga Pengajar

Mutu pendidikan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terlibat, khususnya para pendidik atau tenaga pendidik. Pendidik yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang baik

diharapkan mampu menyampaikan materi secara efektif dan membentuk peserta didik yang cerdas serta berkualitas. Namun, di daerah-daerah terpencil, jumlah pendidik yang tersedia sering kali tidak mencukupi, dan kualitasnya pun belum sesuai dengan standar yang dibutuhkan, sehingga berdampak pada rendahnya mutu pendidikan di wilayah tersebut.

3. Faktor Infrastruktur

Infrastruktur memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pendidikan. Aspek infrastruktur yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan tidak hanya mencakup jumlah dan kondisi bangunan sekolah, tetapi juga mencakup kemudahan akses menuju lokasi sekolah yang memfasilitasi kehadiran siswa. Sayangnya, hal ini tidak sejalan dengan kondisi di wilayah terpencil, di mana akses ke sekolah sangat terbatas dan sulit dijangkau, sehingga seringkali menjadi hambatan dalam kelancaran proses belajar-mengajar bagi peserta didik.

4. Ketersediaan dan Kualitas Buku

Referensi Buku dan bahan referensi merupakan komponen penting yang membantu siswa dan pendidik dalam menjalankan proses pembelajaran secara efektif. Keberadaan serta mutu buku pelajaran sangat vital bagi keberlangsungan pendidikan. Setiap lembaga pendidikan diwajibkan memiliki berbagai sarana pendukung, seperti perabot, alat pembelajaran, media edukatif, buku, dan sumber belajar lainnya, guna menunjang proses belajar yang sistematis dan berkelanjutan.

5. Tingginya Biaya Pendidikan

Biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh pendidikan menjadi indikator terhadap kualitas pendidikan yang didapat. Sekolah dengan biaya tinggi cenderung menawarkan fasilitas yang lengkap dan memadai, sedangkan sekolah dengan biaya rendah umumnya hanya memiliki sarana pendukung yang terbatas. Meski pemerintah telah mengalokasikan dana untuk meringankan beban masyarakat

berpenghasilan rendah, realisasinya belum optimal dan belum merata di seluruh wilayah.

C. Dampak Kesenjangan Sosial di Sekolah Dasar

Dampak-dampak dari kesenjangan sosial yang sering terjadi di sekolah dasar:

1. Rendahnya Kualitas Pendidikan

Perbedaan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi salah satu bentuk nyata dari kesenjangan sosial yang dirasakan oleh peserta didik. Di daerah perkotaan, sumber daya manusia yang lebih kompeten serta fasilitas pendidikan yang lebih lengkap memungkinkan terselenggaranya proses belajar mengajar yang lebih optimal. Tentu akan berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Sebaliknya, di wilayah pedesaan, terbatasnya tenaga pendidik yang berkualitas serta minimnya sarana pembelajaran seringkali menjadi kendala utama dalam menciptakan pengalaman belajar yang efektif bagi siswa. Dampak dari kesenjangan ini bersifat jangka panjang, karena pendidikan yang berkualitas berperan penting dalam membentuk pengetahuan, keterampilan, dan daya saing peserta didik di masa depan. Akibatnya, siswa di daerah tertinggal berisiko mengalami keterbatasan dalam mengakses peluang yang lebih baik di bidang akademik maupun dunia kerja.

2. Keterbatasan Sarana Penunjang Pembelajaran

Kesenjangan sosial juga berdampak langsung pada akses terhadap sarana yang mendukung proses belajar siswa. Pelajar yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah sering kali mengalami kesulitan untuk memiliki media belajar, seperti perangkat teknologi, buku, atau alat bantu pembelajaran lainnya. Kondisi ini berbeda jauh dengan siswa dari kalangan ekonomi atas yang memiliki kemudahan dalam memperoleh berbagai fasilitas tersebut. Ketimpangan ini tidak hanya mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran, tetapi juga memperbesar jarak pencapaian akademik antara siswa dari latar belakang ekonomi berbeda. Dalam jangka panjang, keterbatasan sarana ini dapat

menghambat potensi siswa untuk berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan mereka.

3. Akses Terhadap Pendidikan

Perbedaan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil masih menjadi persoalan serius. Siswa yang tinggal di daerah terpencil sering menghadapi berbagai hambatan geografis, seperti jarak sekolah yang jauh, medan yang sulit ditempuh, serta minimnya infrastruktur transportasi. Kondisi ini membuat mereka kesulitan untuk mengikuti pendidikan secara rutin. Ketimpangan akses tidak hanya berdampak pada kualitas pendidikan, tetapi juga berkontribusi terhadap ketimpangan ekonomi di masyarakat. Ketika pendidikan tidak dapat diakses secara merata, maka kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup pun menjadi terbatas. Lebih jauh lagi, ketimpangan ini dapat menimbulkan berbagai dampak sosial seperti meningkatnya angka kriminalitas, termasuk perundungan, pencurian, hingga tindakan kekerasan lainnya yang lahir dari ketidakadilan dan keterbatasan peluang.

4. Biaya Pendidikan

Biaya merupakan salah satu faktor krusial dalam menentukan kelanjutan pendidikan seseorang. Tidak sedikit anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak mencukupi. Walaupun pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan dan kebijakan pendidikan gratis, implementasi di lapangan sering kali menemui hambatan. Masih ada oknum yang memanfaatkan program-program tersebut untuk keuntungan pribadi, sehingga manfaatnya tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

3. Tantangan Mewujudkan Keadilan Sosial di Sekolah Dasar Perspektif Karl Marx

Mewujudkan keadilan sosial di sekolah dasar merupakan sebuah tantangan yang kompleks. Dalam perspektif teori konflik Karl Marx, pendidikan tidak hanya sekadar proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mengembangkan ketidaksetaraan sosial. Marx memandang masyarakat sebagai struktur yang terbagi antara kelas borjuis, yaitu pemilik modal dan penguasa

ekonomi, serta kelas proletar, yaitu para pekerja yang berada dalam posisi subordinat. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksetaraan akses pendidikan. Biasanya ketidaksetaraan ini muncul karena latar belakang ekonomi yang sering menghadapi berbagai hambatan, seperti biaya tidak langsung pendidikan, dan minimnya fasilitas pendukung di sekolah yang mereka datangi. Kondisi ini mengakibatkan kesulitan dalam memperoleh pendidikan yang setara ataupun akses sekolah yang. Selain itu, kualitas pendidikan di daerah terpencil biasanya kekurangan guru yang kompeten, fasilitas yang memadai, dan materi pembelajaran yang relevan. Lingkungan belajar yang kurang kondusif, baik dari segi fisik maupun sosial, semakin memperparah ketimpangan hasil belajar antara siswa dari kelas sosial berbeda.

Kurikulum di sekolah dasar mencerminkan nilai dan ideologi kelas penguasa dengan menonjolkan pandangan yang mempertahankan kondisi sosial yang ada. Sementara itu, pengalaman dan kebutuhan kelas pekerja atau kelompok kurang diperhatikan, sehingga pendidikan lebih berfungsi sebagai alat yang memperkuat ketidaksetaraan sosial daripada memberdayakan secara adil. Akibatnya, prestasi akademik siswa sering berkaitan erat dengan latar belakang sosial ekonomi mereka, anak-anak dari keluarga mampu biasanya meraih hasil lebih baik karena mendapat dukungan belajar yang lebih optimal dan akses ke sumber belajar tambahan, sedangkan anak-anak yang kurang mampu menghadapi berbagai kendala yang menghambat prestasi anak.

Kesenjangan sosial dan ekonomi yang terlihat di lingkungan sekolah sering kali memicu konflik antara siswa, guru, dan orang tua. Perlakuan yang berbeda, stereotip, serta diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial ekonomi dapat menimbulkan ketegangan yang, jika tidak segera ditangani dengan baik, akan mengganggu proses belajar dan merusak suasana sekolah. Oleh karena itu, tantangan dalam mencapai keadilan sosial di sekolah dasar tidak hanya terkait dengan penyediaan fasilitas dan materi pembelajaran, tetapi juga bagaimana mengelola hubungan sosial di sekolah agar tetap inklusif dan harmonis.

4. Upaya Mengatasi Kesenjangan Sosial di Sekolah Dasar

Upaya mengatasi kesenjangan sosial di sekolah dasar memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari

pemerintah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat. Langkah awal yang krusial Pemerintah harus memastikan bahwa semua anak, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas, serta memberikan bantuan finansial seperti beasiswa dan subsidi perlengkapan sekolah agar biaya pendidikan tidak menjadi hambatan utama bagi keluarga kurang mampu. Kedua, peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah harus menjadi prioritas. Hal ini mencakup pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta penyediaan fasilitas belajar yang memadai seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat peraga. Selain itu, pengembangan kurikulum yang relevan dan inklusif juga penting agar dapat menjangkau kebutuhan beragam siswa dan mengurangi bias yang memperkuat ketimpangan sosial.

Ketiga, pengelolaan program pendidikan yang beragam dan terjangkau harus diperhatikan. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang memastikan semua siswa mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi berdasarkan kemampuan ekonomi. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan harmonis seperti membentuk kelompok belajar tanpa membedakan latar belakang siswa, hal ini sangat penting untuk mengurangi konflik sosial yang muncul akibat perbedaan latar belakang sosial ekonomi. agar dinamika sosial berjalan efektif dan semua siswa merasa dihargai. Secara keseluruhan, upaya mengatasi kesenjangan sosial di sekolah dasar membutuhkan sinergi antara kebijakan pemerintah, peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan fasilitas, dan pengelolaan lingkungan belajar yang inklusif. Dengan langkah-langkah tersebut, pendidikan dasar dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengurangi ketimpangan sosial dan membuka kesempatan yang adil bagi seluruh anak dalam meraih masa depan yang lebih baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesenjangan sosial di sekolah dasar masih menjadi persoalan serius yang tercermin dalam perbedaan akses, kualitas, dan hasil pendidikan antara peserta didik dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. Ketimpangan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor

seperti kualitas sarana dan prasarana, mutu tenaga pendidik, infrastruktur, ketersediaan buku, serta tingginya biaya pendidikan. Dalam perspektif teori konflik Karl Marx, pendidikan di sekolah dasar sering kali berperan dalam memperkuat struktur kelas sosial yang sudah ada, sehingga anak-anak dari keluarga mampu cenderung mendapatkan peluang lebih besar, sementara anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mengalami keterbatasan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, peningkatan fasilitas dan tenaga pendidik, serta kebijakan yang berpihak pada kelompok yang termarjinalkan, agar tercipta keadilan dan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta didik.

DAFTAR REFERENSI

- A. Prayogi, R. Nasrullah, S. Setiawan, and M. A. Setyawan, “The Concept of Conflict and the Theory of Social Conflict in Karl Marx ’ s Thought Konsep Konflik dan Teori Konflik Sosial dalam Pemikiran Karl Marx,” vol. 1, no. 1, pp. 1–11, 2025.
- A. Syafitri *et al.*, “Pengkajian Perspektif Karl Marx dalam Manajemen Pendidikan : Analisis terhadap Ketidaksetaraan Sosial dalam Sistem Pendidikan Pemahaman ketidaksetaraan sosial dalam pendidikan melalui lensa teori Karl mencerminkan dan memperkuat ketidaksetaraan kelas sosial . Ketidaksetaraan sosial,” vol. 2, no. 1, 2024.
- D. Lega and Hartanto, “Tanggungjawab Pemerintah dan Kesenjangan Sosial Dalam Pendidikan,” *Adil Indones. J.*, vol. 4, no. 2, pp. 54–67, 2023, [Online]. Available: <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/2404>
- D. Primadona, W. Novita, and O. Siliani, “Faktor-Faktor Kesenjangan Sosial Di Sekolah Dasar Negeri 01 Tanjung Rancing Kayu Agung,” *J. Sains Student Res.*, vol. 2, no. 3, pp. 852–862, 2024.
- F. N. Kholis and T. Gunarto, “Analisis Pengaruh Kesenjangan Sosial , Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung (2012-2023),” vol. 7, no. 3, 2025, doi: 10.32877/eb.v7i3.2243.
- M. W. N. Tualeka, “Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern,” *Al-Hikmah J. Stud. Agama-agama*, vol. 3, no. 1, pp. 32–48, 2017, [Online]. Available: <https://journal.um-surabaya.ac.id/Ah/article/view/409>

N. Maharani, N. Khoirunnisa, and S. P. Putri, “Analisis Masalah Kesenjangan Sosial Di Sekolah Dasar,” *Paradig. J. Multidiscip. Res. Innov.*, vol. 2, no. 01, pp. 1–16, 2024, doi: 10.62668/paradigm.v2i01.1053.

P. Studi, S. Agama, F. Ushuluddin, and I. Kediri, “Kesenjangan Sosial antara Masyarakat Kelas Buruh,” vol. 29, pp. 76–85, 2023.

S. Hendriwani, “Teori Kelas Sosial Dan Marxsme Karl Marx,” *Paradig. J. Kalam dan Filsafat*, vol. 2, no. 01, pp. 13–28, 2022, doi: 10.15408/paradigma.v2i01.26617.

S. Hujaimah *et al.*, “Faktor, Penyebab, dan Solusi Kesenjangan Sosial Dalam Pendidikan,” *J. Pendidik. Transform. (JPT)*, vol. 02, no. 06, pp. 142–148, 2023.

S. Kekuasaan *et al.*, “PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum,” vol. 3, no. 2, 2024, doi: 10.59818/jps.v3i2.810.

Y. Andriyani, M. Husein Arifin, and Y. Wahyuningsih, “Pengaruh Modernisasi Terhadap Perilaku Siswa Sekolah Dasar,” *Didakt. J. Ilm. PGSD STKIP Subang*, vol. 7, no. 02, pp. 268–278, 2021, doi: 10.36989/didaktik.v7i01.232.

Y. W. Saputri, S. Rhodinia, and B. Setiawan, “Dampak Globalisasi Terhadap Perubahan Gaya Hidup di Indonesia,” *Maximal J. J. Ilm. Bid. Sos. Ekon. Budaya dan Pendidik.*, vol. 1, no. 5, pp. 208–217, 2024, [Online]. Available: <https://malaqbipublisher.com/index.php/MAKSI>